

## ABSTRAK

Ifah, Erna Nur. 2006. *Diskriminasi perempuan Korea Selatan*. Skripsi. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Permasalahan perempuan menjadi permasalahan global di negara-negara di dunia, tidak terkecuali Korea Selatan. Penjajahan Jepang menjadi awal mula lahirnya ketimpangan yang menyebabkan perempuan terpinggirkan, termarginalkan dan tereksplotasi. Seperti halnya Indonesia, perempuan Korea Selatan pun belum mendapatkan hak-haknya secara layak. Tatanan masyarakat masih menganggap bahwa perempuan mempunyai posisi lebih rendah dibandingkan laki-laki. Di negara tersebut masih ditemukan bentuk-bentuk diskriminasi perempuan, baik di ranah ekonomi, sosial maupun politik. Dalam hal ini, pemerintah Korea Selatan melakukan upaya untuk mengatasi diskriminasi perempuan tersebut.

Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah (1) bagaimanakah bentuk-bentuk diskriminasi perempuan Korea selatan?, dan (2) bagaimanakah upaya pemerintah dalam mengatasi diskriminasi perempuan Korea Selatan?. Sebagai dasar pijakan, kerangka pemikirannya menggunakan konsep diskriminasi perempuan dengan teori sistem politik.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*), data-data diperoleh, dikumpulkan dan diolah dari buku-buku, jurnal, surat kabar dan internet (*web site*). Selanjutnya, tujuan penelitian ini selain mengungkap bentuk-bentuk diskriminasi perempuan Korea Selatan dan upaya pemerintah dalam mengatasi diskriminasi perempuan tersebut, juga mencakup tujuan praktis dan teoretis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Korea Selatan masih ditemukan bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Tatanan sosial budaya masyarakat Korea Selatan masih menempatkan perempuan pada posisi nomor dua setelah laki-laki. Bentuk-bentuk diskriminasi ditemukan dalam bentuk ekonomi, sosial, dan politik. Pada bentuk ekonomi, antara lain: upah tenaga kerja dan perdagangan perempuan. Bentuk sosial; kekerasan dalam rumah tangga dan pembunuhan bayi perempuan. Dalam bentuk politik; ketidaksetaraan gender, minimnya partisipasi perempuan dalam politik, dan pemilihan kursi parlemen.

Selain itu, bentuk-bentuk diskriminasi perempuan juga terlihat dari; pertama; upah tenaga kerja perempuan yang tidak sebanding dengan tenaga kerja laki-laki, tenaga kerja perempuan tidak memperoleh jaminan kerja seperti layaknya laki-laki. Pendeknya, proses kerja mereka yang berat tidak sebanding dengan upah yang mereka dapatkan. Kedua; kekerasan dalam rumah tangga yang diterima perempuan yang kebanyakan dilakukan oleh suami-suami mereka serta maraknya aborsi yang dilakukan terhadap perempuan Korea. Ketiga; keterbatasan gerak perempuan dalam organisasi politik yang menerangkan tentang pengambilan keputusan dan persaingan kepemimpinan antara laki-laki dan

perempuan, bahwa perempuan cenderung tidak dapat memimpin dalam sebuah organisasi politik. Terakhir adalah perdagangan perempuan Korea Selatan yang mengakibatkan pelecehan seksual, baik yang dilakukan oleh sindikat perdagangan perempuan dalam negeri maupun di luar negeri.

Berdasarkan bentuk-bentuk diskriminasi tersebut, pemerintah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi diskriminasi perempuan Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan mengangkat sebuah kebijakan yang diangkat dari konfensi PBB, HDR (*Human Development Resorce*) yang mengidentifikasi lima poin untuk mengurangi ketidaksetaraan gender di Korea Selatan, lima poin tersebut; pertama; menghapus diskriminasi legal. Kedua; memfasilitasi perubahan dalam norma-norma sosial dan institusional. Ketiga; melembagakan ambang pintu kritis 30% dalam posisi kunci pembuatan keputusan seperti yang direkomendasikan komisi PBB mengenai status perempuan. Keempat; mengutamakan program pokok untuk meningkatkan kesempatan perempuan, dan yang kelima; program target untuk meningkatkan akses ekonomi dan politik. Kebijakan berikutnya adalah *Mimbar bagi Aksi*, memcantumkan dua belas bidang terpenting tentang kepedulian perempuan yang sebelumnya di dahului dengan gerakan-gerakan protes perempuan. Gerakan tersebut antara lain dilakukan perempuan dengan menggelar aksi protes dengan harapan pemerintah memperbaiki nasib mereka serta mengembalikan hak-haknya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa di Korea Selatan masih ditemukan bentuk-bentuk diskriminasi baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik. Pemerintah Korea Selatan, dalam hal ini berupaya untuk mengatasinya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih berorientasi pada kesetaraan gender dan keadilan sosial demi terwujudnya masyarakat yang bebas dari diskriminasi. .